

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JENEPONTO

1. Nama Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - b. perumusan kebijakan daerah urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - c. penyelenggaraan kebijakan daerah urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - e. penyelenggaraan administrasi urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
  - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### g. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Akumulasi Bobot dari Komponen Penilaian : <ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan Kinerja 30%</li><li>• Pengukuran Kinerja 25%</li><li>• Pelaporan Kinerja 15%</li><li>• Evaluasi Internal 10%</li><li>• Capaian Kinerja 20%</li></ul>
2	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan Dibagi Jumlah pelaku usaha di Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kinerja Realisasi Pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi Pupuk Dibagi RDKK
4	Terjaminnya barang dengan takaran dan timbangan yang sesuai standar	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera/tera ulang di wilayah kab/kota

5	Terpantaunya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok, barang strategis dan barang penting	Persentase Barang kebutuhan pokok, barang strategis dan barang penting yang dipantau	Jumlah barang yang dipantau pada tahun berjalan Dibagi Jumlah Barang kebutuhan pokok, barang strategis dan barang penting di wilayah kab/kota
6	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persentase Kelompok Pedagang yang mendapatkan bantuan	Jumlah Kelompok Pedagang yang mendapatkan bantuan pada tahun berjalan dibagi Jumlah Kelompok Pedagang di wilayah kab/kota
7	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase pertambahan industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Kecil Menengah tahun n – Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun n – 1 dibagi Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun n – 1
8	Meningkatnya pemantauan dan pengawasan Izin Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri	Jumlah izin Industri yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan X 100% Jumlah izin Industri dikeluarkan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
(DISPERDAGIN)**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. MANRANCAIA SALLY, S.STP., M.Si  
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN JENEPONTO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si  
Jabatan : BUPATI JENEPONTO.

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jenepono, 18 Pebruari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si**

**H. MANRANCAI SALLY, S.STP., M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
2	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Izin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan	100
3	Meningkatnya Kinerja Realisasi Pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	95
4	Terjaminnya barang dengan takaran dan timbangan yang sesuai standar	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	49,60
5	Terpantaunya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok, barang strategis dan barang penting	Persentase Barang kebutuhan pokok, barang strategis dan barang penting yang dipantau	100
6	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persentase Kelompok Pedagang yang mendapatkan bantuan	42.13
7	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase pertambahan industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	10
8	Meningkatnya pemantauan dan pengawasan Izin Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.408.183.901,-	.....
2. Program Perizinan dan Pendaftaran	Rp. 15.274.000,-	.....
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 211.800.000,-	.....
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 29.314.000,-	.....
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 67.880.000,-	.....
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 628.150.000,-	.....
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 14.500.000,-	.....
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 15.000.000,-	.....

Jeneponto, 18 Pebruari 2022

BUPATI JENEPONTO,

KEPALA DISPERDAGIN,

**Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si**

**H. MANRANCAI SALLY, S.STP., M.Si**